

BAB II

GAMBARAN PELAYAN DINAS P2KBP3A

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Kabupaten Berau, dan Peraturan Kepala daerah Nomor 57 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau. Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan penggerakan, membawahi :
 - 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas dan Kader Keluarga Berencana;
 - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1) Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
 - 2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 3) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga;
 - 3) Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
 - 2) Seksi Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender;
 - 3) Seksi Bina Organisasi Perempuan.

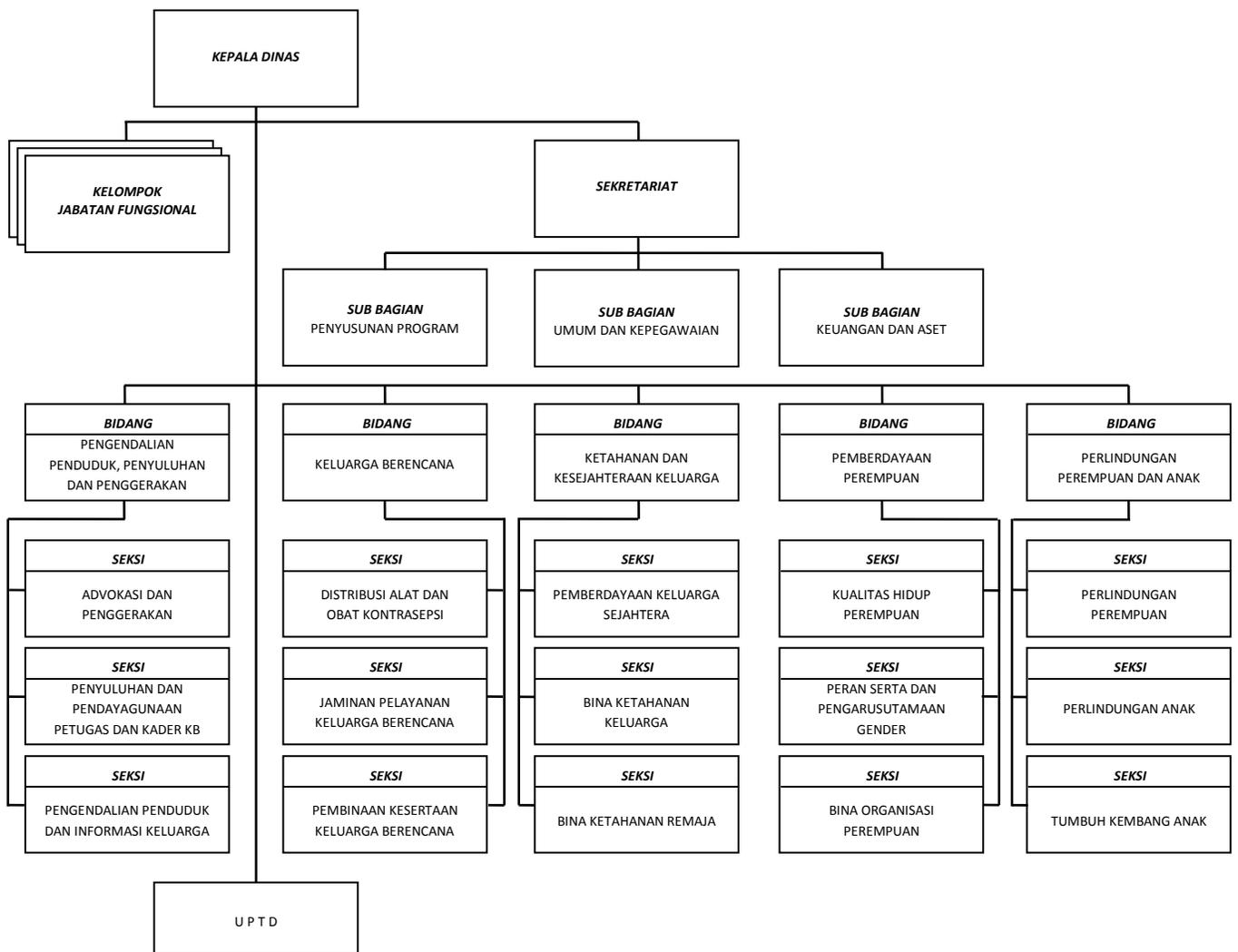
g. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :

- 1) Seksi Perlindungan Perempuan;
- 2) Seksi Perlindungan Anak;
- 3) Seksi Tumbuh Kembang Anak.

h. UPTD

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 (Struktur Organisasi)

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 57 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau lainnya.
- b. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan

- administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas.
 - d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Dinas.
 - e. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset Dinas.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan yang meliputi advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan petugas dan kader keluarga berencana serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
 - g. Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di bidang advokasi dan penggerakan di bidang advokasi dan penggerakan.
 - h. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas dan Kader Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan petugas dan kader keluarga berencana.
 - i. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
 - j. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang keluarga berencana yang meliputi distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon), jaminan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan kesertaan keluarga berencana.
 - k. Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di bidang distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon).

- l. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di bidang jaminan pelayanan keluarga.
- m. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana.
- n. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga dan bina ketahanan remaja.
- o. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera.
- p. Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di bidang bina ketahanan keluarga.
- q. Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di bidang bina ketahanan remaja.
- r. Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi kualitas hidup perempuan, peran serta dan pengarusutamaan gender bina organisasi perempuan.
- s. Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan di bidang kualitas hidup perempuan.
- t. Seksi Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan di bidang peran serta dan pengarusutamaan gender.
- u. Seksi Bina Organisasi Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan di bidang bina organisasi perempuan.
- v. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang kesejahteraan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak.
- w. Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di bidang perlindungan perempuan.

- x. Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di bidang perlindungan anak.
- y. Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di bina tumbuh kembang anak.

2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Sebanyak 68 Orang termasuk tenaga honorer. Di lihat dari segi pendidikan, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau terdiri dari 27 orang SMA Sederajat, 3 orang D3, 34 orang Strata 1 dan 4 orang Strata 2 selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2017
(Per April)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	12	8	4	3	27
3	D3	1	1	-	1	3
4	S1	12	20	1	1	34
5	S2	2	2	-	-	4
6	S3	-	-	-	-	0
jumlah		27	31	5	5	68
		58		10		

Di lihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa tenaga kerja di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau tenaga klasifikasi Magister (S2) sebanyak 4 orang (5,8%), tenaga klasifikasi Sarjana (Strata 1) sebanyak 34 Orang (50%), tenaga klasifikasi Sarjana Muda (D3) sebanyak 3 orang (4,4%), tenaga klasifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat sebanyak 27 orang (39,7%) . Di lihat dari tabel 2.1 diatas, hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau umumnya pada tingkat pendidikan sarjana.

Dari 68 jumlah Pegawai yang ada di Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau terdapat 12 orang pegawai yang berstatus golongan II, 38 orang pegawai yang berstatus golongan III, 8 orang golongan IV dan 10 orang PTT/Tenaga Kontrak selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2017
(Per April)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	8	4	12
2	Golongan III	14	24	38
3	Golongan IV	5	3	8
4	PTT/Tenaga Kontrak	5	5	10
	Jumlah	32	36	68

Jika di lihat dari tabel 2.2 di atas dan di lihat dari Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau (Gambar 2.1), jumlah pegawai khususnya untuk staf masih sangat kurang. Pada Struktur Organisasi Dinas PPKBP2PA terdapat lima Bidang dan satu sekretariat yang masing-masing Bidang membawahi tiga Seksi dan tiga kasubbag dengan jumlah keseluruhan Seksi adalah lima belas Seksi dan 3 Kasubbag, setiap Seksi dan Kasubbag hanya memiliki satu staf seharusnya minimal masing-masing Seksi dan Kasubbag memiliki dua orang staf.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana kerja yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau tergolong cukup memadai, hal ini dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2016

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
1	Meja Rapat	1		1
2	Kursi Rapat	48		48
3	Sofa	1		1
4	Jam Elektronik	2		2
5	Lemari Es	1		1
6	Televisi	5	1	6
7	Dispenser	9		9
8	Laptop	31		31

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
9	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1		1
10	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1		1
11	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	1		1
12	Papan Nama Instansi	14		14
13	Neon Box	1		1
14	Lemari Kayu	2	1	3
15	Bangku Tunggu	1		1
16	Meja Biro	20		20
17	Kursi Kerja	4		4
18	AC Split	10		10
19	Kompas Gas	2		2
20	Magic Jar	1		1
21	Wireless	16		16
22	Alat Rumah Tangga Lain-lain	16		16
23	Spring Bed	3		3
24	PC Unit	15		15
25	Printer	39		39
26	Kursi Rapat Ruang Data	40		40
27	Kursi Tamu di Ruang Tunggu Pejabat Eselon I	1		1
28	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	11		11
29	Mesin Ketik Elektronik	5		5
30	Filling Besi/Metal	3		3
31	Overhead Projektor	1	1	2
32	Hardisk Eksternal	1		1
33	Peti Uang	1		1
34	Note Book	8		8
35	Mesin Hitung Manual	10		10
36	White Board	4		4
37	Tabung Gas	1		1
38	Alat Dapur Lain-lain	2		2
39	Camera Video	3		3
40	Keranjang Sampah	6		6
41	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1		1
42	Mesin Ketik Longewagen (18)	5		5
43	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4		4
44	Rak Kayu	1		1
45	AC Unit	1		1
46	Kipas Angin	6		6
47	Unit Power Supply	4		4
48	Handy Cam	1		1
49	Stavol	16		16
50	Personal Komputer Lain-lain	19		19
51	Keyboard	1		1
52	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	6		6
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4		4

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
54	Kursi Rapat Ruang Rapat Staf	21		21
55	Compact Disc. Player	1		1

Di lihat dari kondisi pada tabel 2.3 di atas, sarana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau tergolong cukup memadai. Sedangkan untuk prasarana Dinas PPKBP2PA Kabupaten Berau, jika di lihat dari jumlah pegawai dan struktur Organisasi Dinas masih belum memadai di karenakan Kantor Dinas P2KBP3A Kabupaten Berau masih menggunakan gedung terpadu (1 atap) yang luasan ruang kerjanya antara Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi masih menjadi satu dengan ruangan kesekretariatan yang membuat orang tidak dapat membedakan masing-masing bagian dan mengakibatkan tidak optimalnya pada pelayanan publik.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Berau

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2011 - 2015

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2016
1	Cakupan PUS yang usianya dibawah usia 20 tahun	%	7	6	5	4					2,09						
2	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	%	66,27	69,18	72,09	75					70,98						
3	Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmed Need)	%	18,06	14,71	11,36	8					13,72						
4	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber – KB	%	65	70	75	80					89,70						
5	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yan ber – KB	%	89,22	92,82	96,40	100					65,80						
6	Ratio Penyuluh KB (PKB/PLKB)	%	1=5	1=4	1=3	1=2					0,15						
7	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	%	100	100	100	100					1						
8	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	30	30	30	30					0						
9	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100					100						
10	Cakupan Perempuan dan Anak korban Kekerasan yang mendauapatkan penanganan	%	100	100	100	100					100						

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2016
	pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu																
11	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS.	%										0					
12	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas Rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan	%										0					
13	Cakupan layanan bimbingan Rohani yang diberikan oleh petugas Bimbingan Rohani terlatih bagi perempuan dan Anak korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak	%										0					
14	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyelidikan sampai putusan pengadilan atas Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%										100					
15	Cakupan perempuan dan anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan Hukum	%										100					
16	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan anak	%										0					

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2016
	Korban Kekerasan																
17	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan anak korban Kekerasan.	%									100						

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja tidak dapat di hitung karena tidak tersedianya data.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2011 - 2015

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	612,064,000	581,849,000	885,278,000	1,363,203,000	2,118,372,800	587,243,028	549,923,865	802,107,114	1,169,616,972	1,784,203,243	95.94	94.51	90.61	85.80	84.23
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	29,480,000	15,000,000	150,000,000	100,000,000	-	29,410,000	15,000,000	50,000,000	100,000,000	#DIV/0!	99.76	100.00	33.33	100.00
3	Program peningkatan Disiplin Aparatur	-	54,910,000					45,113,000	-	-	-	#DIV/0!	82.16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	75,000,000	100,000,000	86,000,000	181,080,000	80,000,000	73,235,000	98,525,000	83,197,900	149,793,400	78,932,472	97.65	98.53	96.74	82.72	98.67
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25,000,000	5,000,000	30,000,000	30,000,000	100,000,000	25,000,000	4,978,800	29,851,100	29,999,800	95,054,500	100.00	99.58	99.50	100.00	95.05
6	Program Keluarga Berencana	794,478,000	1,612,025,000	1,242,435,000	1,597,310,000	2,753,218,000	637,646,010	1,539,580,000	1,222,773,200	620,810,000	1,263,207,764	80.26	95.51	98.42	38.87	45.88
7	Program Pelayanan Kontrasepsi	200,000,000	250,000,000	270,000,000	250,000,000	530,000,000	191,832,900	249,056,970	269,722,400	68,552,800	286,246,000	95.92	99.62	99.90	27.42	54.01
8	Program Kesehatan	100,000,000	359,549,000	303,865,000	413,449,000	983,309,200	99,820,000	352,258,850	268,099,050	299,700,800	815,039,100	99.82	97.97	88.23	72.49	82.89

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Reproduksi Remaja															
9	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	-	-	82,515,000	274,375,000			-	78,920,600	107,367,200		#DIV/0!	#DIV/0!	95.64	39.13	#DIV/0!
10	Program Perbaikan Gizi	928,522,000	880,909,800	-	-		927,288,900	866,676,400		-		99.87	98.38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Bina				250,000,000					90,416,800		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	36.17	#DIV/0!
12	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	-	54,095,000	75,000,000	461,470,000		-	48,367,600	35,000,000	355,312,150	#DIV/0!	#DIV/0!	89.41	46.67	77.00
13	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	2,078,000,000	4,844,461,000	7,862,071,000	9,130,190,000	8,360,884,950	2,044,568,050	4,691,441,167	6,949,968,875	6,260,724,350	6,150,146,710	98.39	96.84	88.40	68.57	73.56
14	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100,000,000	60,000,000	266,270,000	395,750,000	495,436,000	99,141,000	47,708,900	256,043,300	241,879,000	252,618,300	99.14	79.51	96.16	61.12	50.99
15	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	150,000,000	365,000,000	248,315,000	670,750,000	1,641,358,500	144,336,900	311,842,500	233,347,600	287,795,400	1,092,706,500	96.22	85.44	93.97	42.91	66.57
16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	509,600,000	-	486,810,000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	Jumlah / Pertahun	5,063,064,000	9,652,783,800	11,345,844,000	15,267,917,000	17,624,049,450	4,830,111,788	8,786,515,452	10,257,398,739	9,411,656,522	12,273,466,739	95.40	91.03	90.41	61.64	69.64

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa secara garis besarnya terdapat peningkatan jumlah anggaran dari tahun 2011 – 2015 adapun ratio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2011-2013 mencapai 90 % namun pada tahun 2014 – 2015 rasio antara realisasi dan anggaran mengalami penurunan menjadi 69 %.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau kurun waktu tahun 2011 – 2015, SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan SPM terpadu Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Berau adapun capaian kinerja diuraikan sebagai berikut

1. Pelayanan KB

1.1 Grafik 2.1 Persentase akseptor KB aktif

Buat grafik berdasar data akseptor KB aktif dari tahun 2011-2015 kemudian di analisa kenaikan dan penurunannya Mohon penyelesaian dari bidang KB

Data yang ada

$$\% \text{ Akseptor KB} = \frac{\text{Jml. Akseptor KB}}{\text{PUS}} \times 100\%$$

Uraian	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Jml. Akseptor KB	Aks		24.166	25.471	28.162	48.126
Jml. PUS	PUS		35.637	37.720	38.718	44.471
% Akseptor KB	%		67,81	67,53	72,74	68,12

1.2 Grafik 2.3 Cakupan peserta aktif KB Pria

Buat grafik berdasar data peserta aktif KB Pria dari tahun 2011-2015 kemudian di analisa kenaikan dan penurunannya Mohon penyelesaian dari bidang KB

Data yang ada

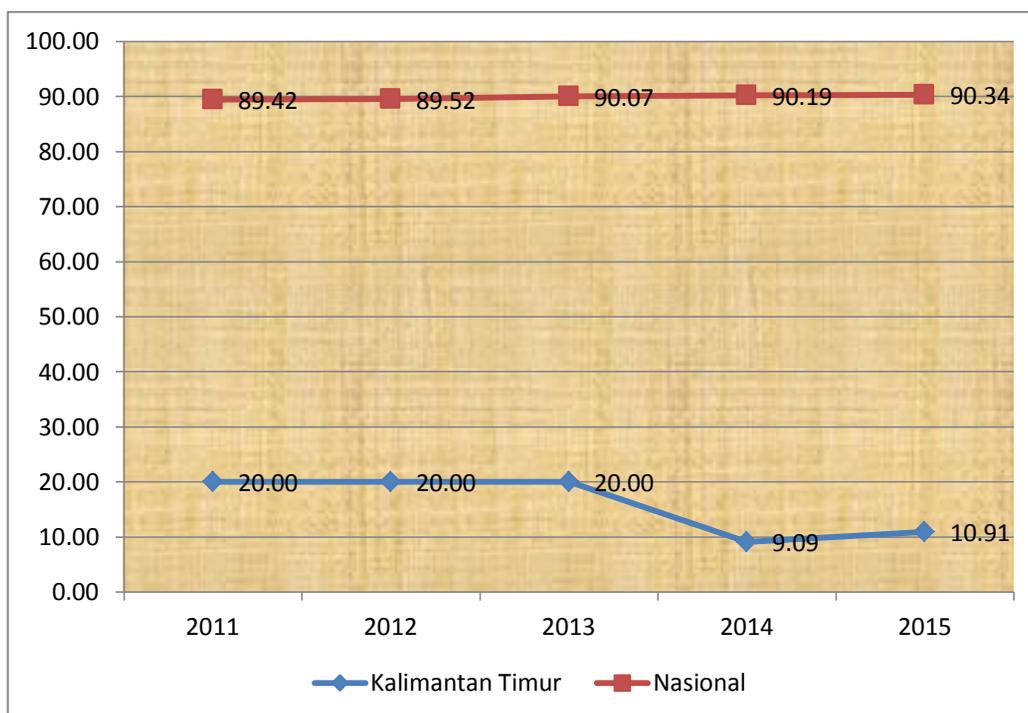
$$\% \text{ Peserta aktif KB pria} = \frac{\text{Jml. peserta aktif KB pria}}{\text{Jml. Peserta KB Pria}} \times 100\%$$

Uraian	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Jml. Peserta aktif KB pria	Aks		24.166	25.471	28.162	48.126
Jml. Peserta KB Pria	PUS		35.637	37.720	38.718	44.471
% Peserta aktif KB Pria	%		67,81	67,53	72,74	68,12

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

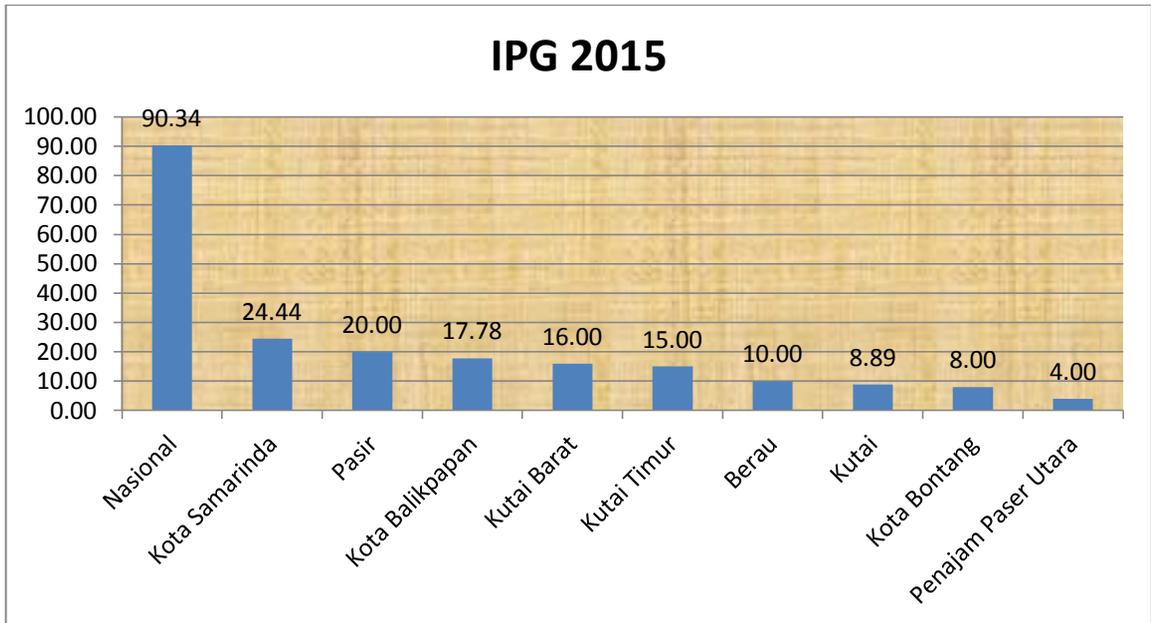
IPG Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan lebih rendah, dibandingkan capaian nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG menurun di tahun 2014 di bandingkan 3 tahun sebelumnya dan mengalami sedikit kenaikan di tahun 2015 :



Grafik2.5 Persandingan capaian IPG Provinsi Kalimantan Timurdengan IPG Nasional

Sumber : BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016

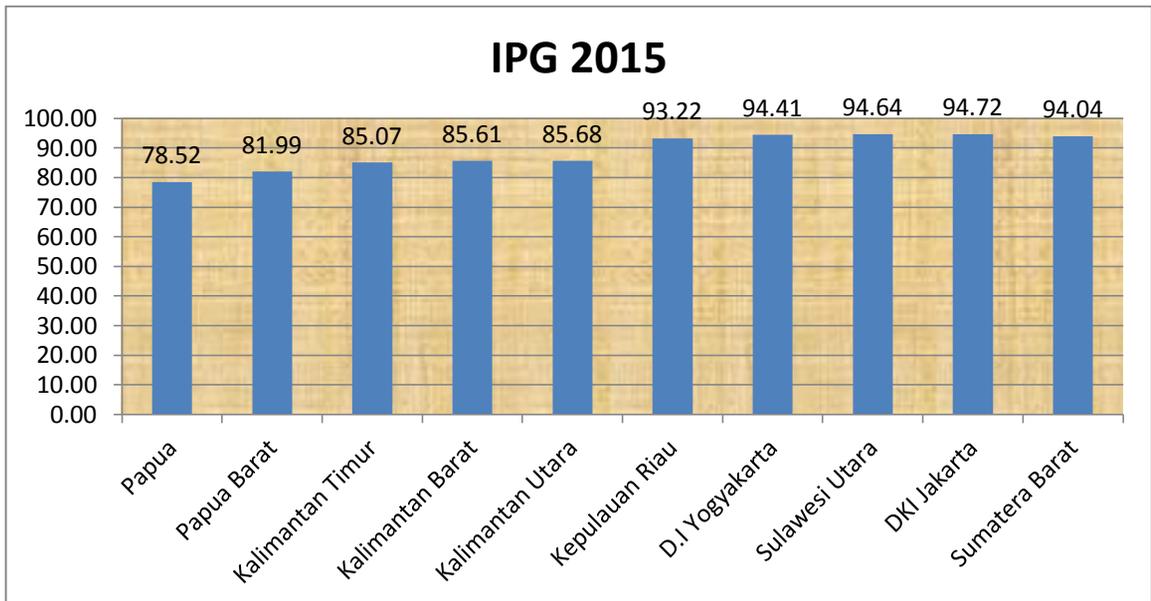
Dilihat capaian IPG kabupaten kota Berau menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten kota. Kota Samarinda merupakan kota dengan IPG tertinggi sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara capaian IPGnya rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Grafik2.6 Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur dengan IPG Provinsi dan IPG Nasional.

Sumber : BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016

Jika diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau menunjukkan capaian lebih bagus dari Kutai dan Bontang, dan Kabupaten Berau berada dibawah Kutai Timur. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :

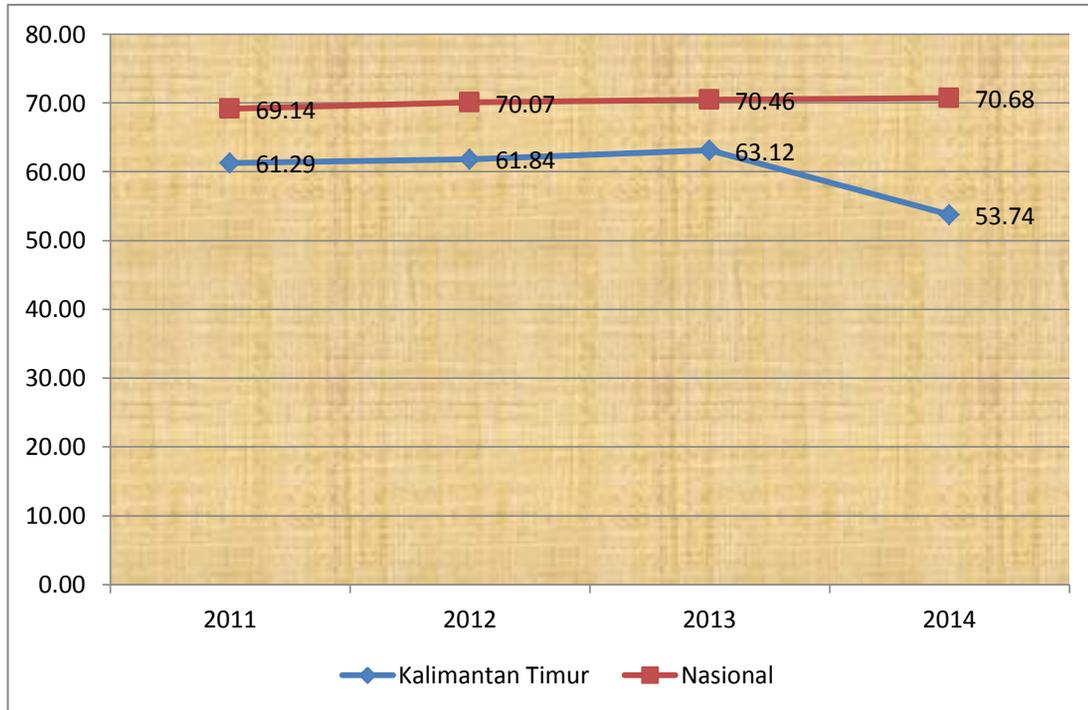


Grafik2.7 Persandingan capaian IPG Provinsi Kepri dengan IPG Provinsi lainnya dan IPG Nasional.

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

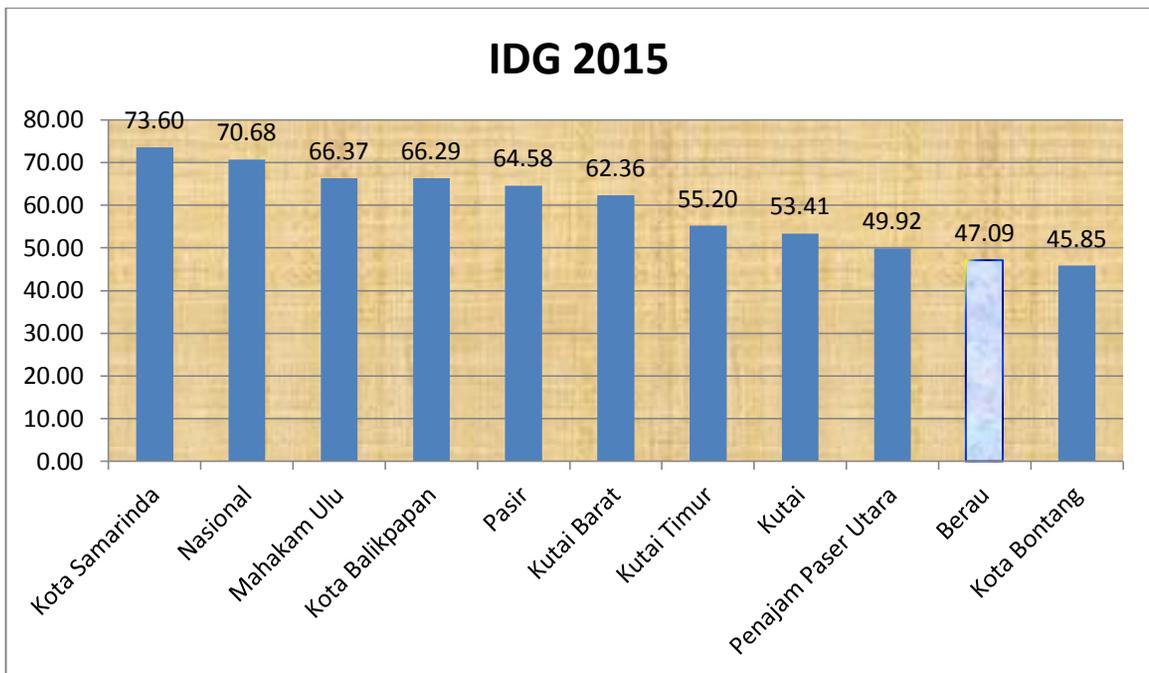
Capaian IDG Kalimantan Timur pada tingkat provinsi cukup baik, namun berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun dari tahun 2014. Penurunan ini antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.8 IDG Provinsi Kalimantan Timur 2011-2014

Sumber : BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016.

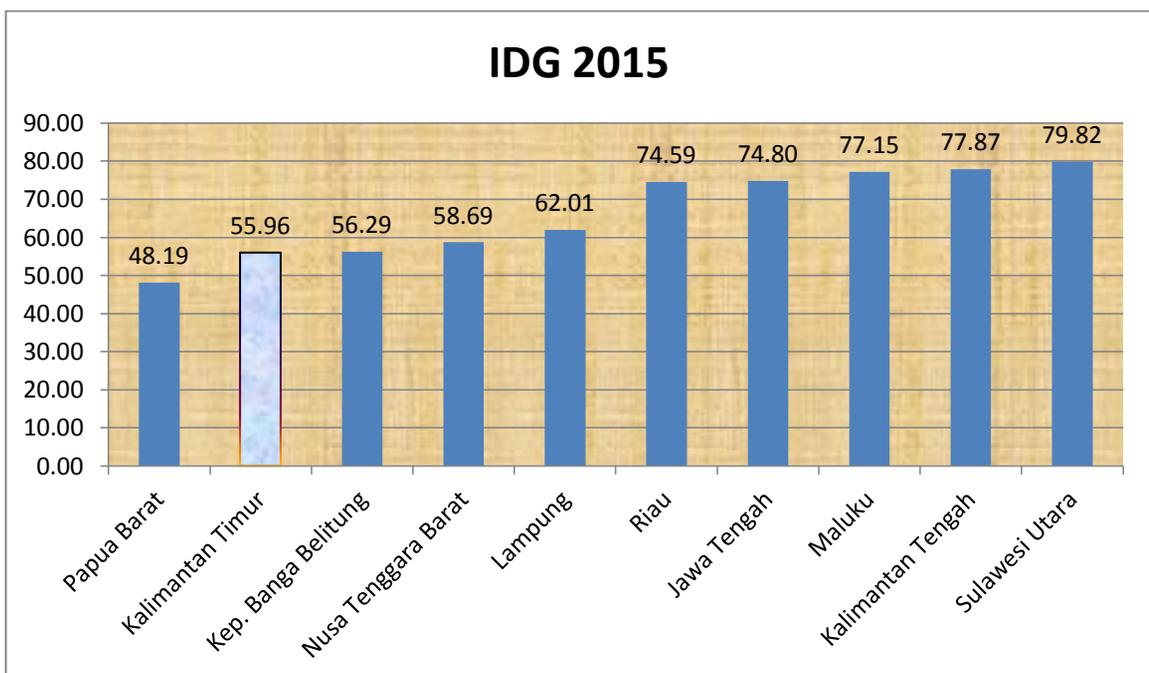
Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Kabupaten Berau, maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Kutai Timur, Kutai, Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau memiliki angkadi bawah 60. Bahkan Kota Bontang hanya 45,85. Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.9 IDG Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota 2015

Sumber : BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016.

Jika diperbandingkan dengan provinsi Lain, maka nampak posisi provinsi Kalimantan Timur berada dibawah provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, Jawa Tengah, Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Kep. Bangka Belitung. Kalimantan Timur lebih bagus dari Papua Barat. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.10 IDG Provinsi Kepri dan Provinsi Sekitar 2014

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

3. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Buat grafik 2.11 berdasar data Jumlah kasus yang masuk dan jumlah kasus yang di tangani dari tahun 2011-2015 kemudian di analisa kasus tertangani dan tidak terangani Mohon penyelesaian dari bidang PA

Data yang ada

$$\% \text{ Kasus yang di selesaikan} = \frac{\text{Jml. Kasus yang ditanganix}}{\text{Jml. Kasus masuk}} 100\%$$

Uraian	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Jml. Kasus yang ditangani	Kasus	24	33	36	30	54
Jml. Kasus Masuk	Kasus	24	33	36	30	50
% Kasus yang di selesaikan	%	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas Pelayanan terhadap kasus kekerasan setiap tahunnya dapat di selesaikan atau di tangani berdasarkan kasus yang masuk dengan capaian 100 % setiap tahunnya.

4. Tumbuh Kembang Anak

Capain kinerja pada kegiatan tumbuh kembang anak adalah dengan di bentuknya Forum Anak Daerah Kabupaten pada tahun 2011 sebagai wadah perhimpunan perwakilan dari masing –masing organisasi anak. Pada tahun 2012 s.d 2015 pembentukan forum anak tidak berlanjut ke Kecamatan di karenakan terbatasnya dana atau anggaran, sehingga menimbulkan belum optimalnya keterlibatan anak dalam forum anak, Sosialisasi tentang Forum Anak belum maksimal dan belum terlatihnya fasilitator forum anak. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau**

2.3.1 Tantangan/Ancaman (threats)

- Masih adanya anggapan KB hanya urusan perempuan
- Kesetaraan pria ber KB masih rendah
- Masih kurangnya pemahaman tentang keluarga sejahtera yang ber KB
- Pelayanan kontrasepsi secara gratis kepada masyarakat miskin belum optimal
- Belum semua klinik KB tersedia tenaga medis yang berkualitas
- Dukungan kader dan masyarakat dalam pendataan belum optimal
- Kurangnya tenaga penyuluh KB (PKB) sehingga kurangnya pemahaman masyarakat tentang KB

- h. Masih kurangnya permodaan untuk kelompok usaha peningkatan pendapat keluarga sejahtera (UPPKS)
- i. Keterlibatan anak pada forum anak belum optimal
- j. Pengaruh negatif kemajuan teknologi terhadap perkembangan perilaku anak
- k. Belum maksimalnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan (partisipasi perempuan dalam legislatif, perempuan sebagai tenaga profesional, masih rendahnya sumbangan penghasilan perempuan terhadap keluarga)
- l. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan lansia (potensi)
- m. Belum optimalnya kelembagaan PUG
- n. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- o. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi
- p. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- q. Kualitas kader/tenaga pendamping belum optimal
- r. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- s. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- t. Lembaga penanganan kasus perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan desa masih kurang

2.3.2 Peluang (Opportunity)

- a. Dukungan dari pemerintah terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga dari pusat, Provinsi dan Daerah semakin meningkat.
- b. Komitmen mitra kerja terhadap program Keluarga Berencana (KB) semakin besar.
- c. Adanya regulasi pemerintah tentang KB dan PPPA
- d. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- e. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.

- f. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- g. Dukungan lembaga pemerhati perempuan dan anak antara lain lembaga perlindungan anak (LPA), Pokja PUG, Gugus tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) serta Pusat Perlindungan Terhadap Perlingungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- h. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- i. Peningkatan kualitas PKB/PLKB/Bidan/Kader melalui Bimtek dan Pelatihan.
- j. Meningkatnya akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi.
- k. Adanya keinginan dan minat para ibu – ibu dalam meningkatkan keterampilan industri rumah tangga dalam menunjang ekonomi keluarga.
- l. Adanya kesempatan untuk pengembangan kapasitas dan kualitas SDM

2.3.3 Kekuatan (strengths)

- a. UU no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- b. Ketersedia SDM dan Sarana Prasarana walaupun belum maksimal
- c. Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang bertugas di Kecamatan
- d. Dukungan tim KB Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang optimal
- e. Komitmen Pemerintah Pusat dan daerah mendukung urusan KB dan PPPA
- f. Terbentuknya P2TP2A di Kabupaten dan Kecamatan

2.3.4 Kelemahan (Weakness)

- a. Persentase Unmeet Need masih tinggi
- b. Kompetensi PKB yang masih kurang di lapangan
- c. Masih kurangnya tenaga PKB dikarenakan PKB yang ada belum ideal dengan jumlah kampung yang ada
- d. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data pilah dan system informasi tentang PUG, PPPA dan KB
- e. Belum adanya komitmen OPD untuk melaksanakan PPRG
- f. Kualitas dan kualitas SDM dan Sarana prasarana kurang mendukung.
- g. Pembinaan terhadap kader belum optimal
- h. Sinkronisasi program KB dan PPPA belum optimal.

Berdasarkan dari analisa SWOT diatas maka factor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Strategi SO (Memaksimalkan *Strength* / Kekuatan untuk memanfaatkan *Opportunity*/peluang)
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dengan memaksimalkan peran swasta, dan pembinaan yang efektif terhadap LSM atau organisasi masyarakat pemerhati anak.
 - b. Jumlah SDM yang memungkinkan untuk melakukan sosialisasi / kampanye yang efektif secara berkala atas Perda / Peraturan terbaru dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang mendukung Program KB dan PPPA.
 - c. Secara periodic melakukan capacity building POKJA PUG dalam mendorong implementasi PPRG pada OPD untuk menuju kesetaraan Gender.
2. Strategi ST (Memaksimalkan *Strength*/Kekuatan untuk mengurangi Threat/ancaman)
 - a. Memaksimalkan dana operasional untuk membiayai kegiatan operasional
 - b. Mengutamakan program prioritas terhadap Keluarga Berencana (KB) dan PPPA
 - c. Memaksimalkan koordiansi dengan mitra kerja lain / Stekeholder dalam program Keluarga Berencana (KB) dan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Strategi WO (Minimalkan *Weakness* / Kelemahan untuk menangkap *Opportunity* /peluang)
 - a. Pelaksanaan pelatihan teknis / fungsional, kursus secara berkala dan terencana untuk peningkatan SDM.
 - b. Mengevaluasi kembali system pembinaan Lembaga Swadaya masyarakat, Organisasi Masyarakat pemerhati anak untuk efektif peningkatan kualitas
4. Strategi WT (Meminimalkan *Weakness*/Kelemahan untuk menghindari *Threat*/ ancaman)
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi informasi dari pihak terkait tentang data terpilah laki-laki dan perempuan dalam segala bidang
 - b. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk kegiatan operasional.